

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada dasarnya hukum sebagai pedoman dan aturan yang harus ditaati agar tercipta suatu keadilan, keamanan, serta ketentraman dalam masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia harus memegang teguh 3 (tiga) nilai dasar hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Keadilan adalah suatu pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam hal ini keadilan selalu dikaitkan dengan prinsip *equality before the law* yang artinya semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Kepastian berarti telah ada aturan yang menjelaskan apakah suatu perbuatan di anggap benar atau salah. Adanya kepastian hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, selain itu kepastian hukum juga memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya mereka terima. Kepastian hukum dapat diwujudkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang jelas. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan

kemanfaatan berarti hukum yang diterapkan harus memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Hukum tidak hidup di ruang hampa, hukum terlahir dan hidup di dalam masyarakat untuk mengantisipasi dan menjadi solusi atas terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan sebagian orang, oleh karena itu hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga nilai dasar hukum tersebut sangat berhubungan erat antara satu dengan yang lain dan harus selaras dan harmonis agar tercipta ketertiban di dalam masyarakat (*social order*).

Hukum yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan Negara, yang prinsipnya apabila terdapat masyarakat yang melakukan tindak pidana berarti telah melawan Negara melalui aturan hukum pidana yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum. Akan tetapi pada kenyataannya, warga Negara yang lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat dikatakan bahwa warga Negara tersebut telah melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Dengan dilanggarnya aturan hukum, maka konsekuensinya adalah pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan oleh pelaku tindak pidana.

Hukum pidana mempelajari beberapa bagian ilmu, salah satunya adalah kriminologi. Kriminologi merupakan disiplin ideografis, yang artinya menggambarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Kriminologi dapat

didefinisikan sebagai suatu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan.

Kriminologi mempelajari:¹

- a. Gejala kejahatan dan mereka yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan.
- b. Sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L. Haskell dan Lewis Yablonski menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang:²

- a. Sifat dan luas kejahatan.
- b. Sebab-sebab kejahatan.
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana.
- d. Ciri-ciri penjahat.
- e. Pembinaan penjahat.
- f. Pola-pola kriminalitas, dan
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia dalam

¹Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*". Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1996, hlm.143

²Indah Sri Utami, "*Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.6

masyarakat. Harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain.³

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana sangatlah erat, dapat dijelaskan bahwa hukum pidana berisi teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi berisi teori mengenai gejala hukum di dalam masyarakat. Sebagai salah satu obyek penelitian kriminologi adalah kejahatan. Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan di dalam hukum maupun tidak.⁴

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-347 s.m) misalnya menyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Republiek*" menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu Aristoteles (382-322 s.m) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri".⁵

Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma

³Topo Santoso, dan Eva Achzani Zulfa, "*Kriminologi*" Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.3

⁴Muhammad Mustofa. "*Metodologi Penelitian Kriminologi*". Kencana, Jakarta, 2013, hlm.9

⁵Topo Santoso, dan Eva Achzani Zulfa, *Op.Cit*, hlm.1

tersebut tidak hanya dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup di masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu Negara.⁶

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan oleh karena itu diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma adat, dan norma hukum. Diantara beberapa norma tersebut, bentuk sanksi yang paling berat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Di Kabupaten Kudus sendiri pelanggaran hukum dan pelanggaran norma masih sering terjadi. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan moral dan pendidikan hukum pada sebagian masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang memadai dan masih banyak masyarakat yang kurang tau mengenai aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan dan keterampilan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Kudus. Salah satu dampak yang ditimbulkan karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah adalah banyaknya masyarakat yang terpaksa mencari uang di jalan seperti mengamen, mengemis, dan sebagian menjadi preman. Sampai saat ini masih banyak gelandangan dan anak-anak yang berada di jalanan.

⁶Sudarto, *Op. Cit.* hlm.hlm.143

Hal tersebut juga berdampak terhadap meningkatnya kriminalitas yang ada di Kabupaten Kudus.

Masalah tersebut sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah untuk segera ditindaklanjuti karena di dalam konstitusi kita terdapat Pasal yang mengatur, yakni Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan rakyat yang hidup di jalanan khususnya pemerintah Kabupaten Kudus.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini peraturan daerah mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dianggap mengganggu masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu penyebab peningkatan kriminalitas di Kabupaten Kudus.

Sebelum menuju permasalahan, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan mengembara di tempat umum. Selanjutnya yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan

bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Meskipun Perda sudah diterapkan sejak tahun 2017, tetapi sampai saat ini masih banyak gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang ada di Kabupaten Kudus. Menurut Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, Sarjono, beliau mengatakan bahwa selama ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas sebagai pelaksana Perda dengan semaksimal mungkin. Beberapa agenda dalam rangka penertiban setiap hari dilakukan, tetapi masih saja ada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Kudus. Sampai sekarang masih dicari cara yang paling efektif untuk menanggulangi penyakit masyarakat tersebut.⁷

Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Kudus masih terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas di jalan dengan cara menggelandang, mengamen, dan mengemis, salah satu kelompok jalanan yang saat ini sering diperbincangkan adalah komunitas punk. *Punk* adalah budaya yang lahir di London Inggris, *punk* juga bisa diartikan sebagai suatu ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik yang diikuti oleh anak-anak muda yang mengalami masalah ekonomi dan keluarga yang dipicu oleh kemerosotan moral.⁸

Berbagai macam pandangan mengenai penyebab seorang remaja masuk atau mengikuti komunitas *punk*, tetapi yang paling sering terjadi adalah karena faktor lingkungan, keluarga, dan juga faktor ekonomi. Akhirnya dengan adanya

⁷ Sarjono, "Wawancara Pribadi" Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan. 23 Maret 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kudus.

⁸ [Id.wikipedia.org/punk](https://id.wikipedia.org/punk). Diakses 3 oktober 2017 07.45

komunitas *punk* timbul berbagai masalah sosial atau penyakit sosial di dalam masyarakat. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.⁹

Beberapa literatur menyebutkan bahwa *punk* adalah singkatan dari *public united nothing kingdom* yang artinya perkumpulan orang anti peraturan kerajaan. Mereka menganggap bahwa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah hanya bisa memaksa tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Berdasarkan pandangan hidup seperti itu, tidak jarang komunitas *punk* melakukan suatu kejahatan.¹⁰ Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya penganiayaan oleh komunitas *punk* terhadap seorang anak pondok pesantren di alun-alun simpang tujuh Kudus beberapa waktu yang lalu. Hal serupa juga terjadi di jalan raya Kudus-Semarang tepatnya di perbatasan Kudus dan Demak yakni seorang supir truk yang melaju kearah Kudus dihadang dan dikeroyok oleh beberapa anggota komunitas *punk* karena menolak untuk memberikan tumpangan. Menurut beberapa pengakuan dari masyarakat, komunitas *punk* juga sering terlihat berbuat onar di jalan raya, tentu saja hal tersebut membuat masyarakat prihatin dan resah terhadap komunitas *punk* di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan statistik kriminal Polres Kudus, tidak ada pengelompokan tersendiri mengenai kejahatan yang dilakukan komunitas *punk*. Tetapi Darmono, salah satu anggota penyidik Satuan Sabhara Polres Kudus menjelaskan bahwa

⁹Kartini kartono. "*Patologi Sosial II: Kenakalan Renaja*", Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm.4

¹⁰Googleweblight.com/gaya.tempo/punk-indonesia. Diakses 3 oktober 2017 20.00

untuk mengidentifikasi seseorang termasuk golongan atau anggota komunitas *punk* dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri-ciri tertentu, yaitu ciri fisik maupun ciri psikis.¹¹ Secara fisik mereka berpenampilan rusuh dengan memakai pakaian yang compang-camping, tubuh dipenuhi tato serta aksesoris seperti gelang, kalung, dan tindik. Biasanya mereka melakukan aktivitas di jalan raya seperti mengamen, nongkrong, dan berpindah-pindah tempat. Secara psikis mereka adalah masyarakat yang anti sosial dan tidak peduli terhadap aturan baik aturan agama maupun aturan Negara.

Beberapa fenomena yang telah disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil yang telah diketahui, tetapi masih banyak permasalahan dan kejahatan yang belum diketahui (*dark number*). Timbul berbagai pertanyaan, sebenarnya apa faktor yang menyebabkan komunitas *punk* melakukan berbagai kejahatan di Kabupaten Kudus? Hal tersebut membuat Penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penyebab komunitas *punk* melakukan suatu kejahatan di Kabupaten Kudus yang tertuang didalam judul skripsi **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KOMUNITAS PUNK di KABUPATEN KUDUS”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut:

¹¹ Darmono, “Wawancara Pribadi”, Anggota Penyidik Satuan Sabhara, 20 Oktober 2017, Polres Kudus.

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus?
2. Apa saja jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menanggulangi berbagai kejahatan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

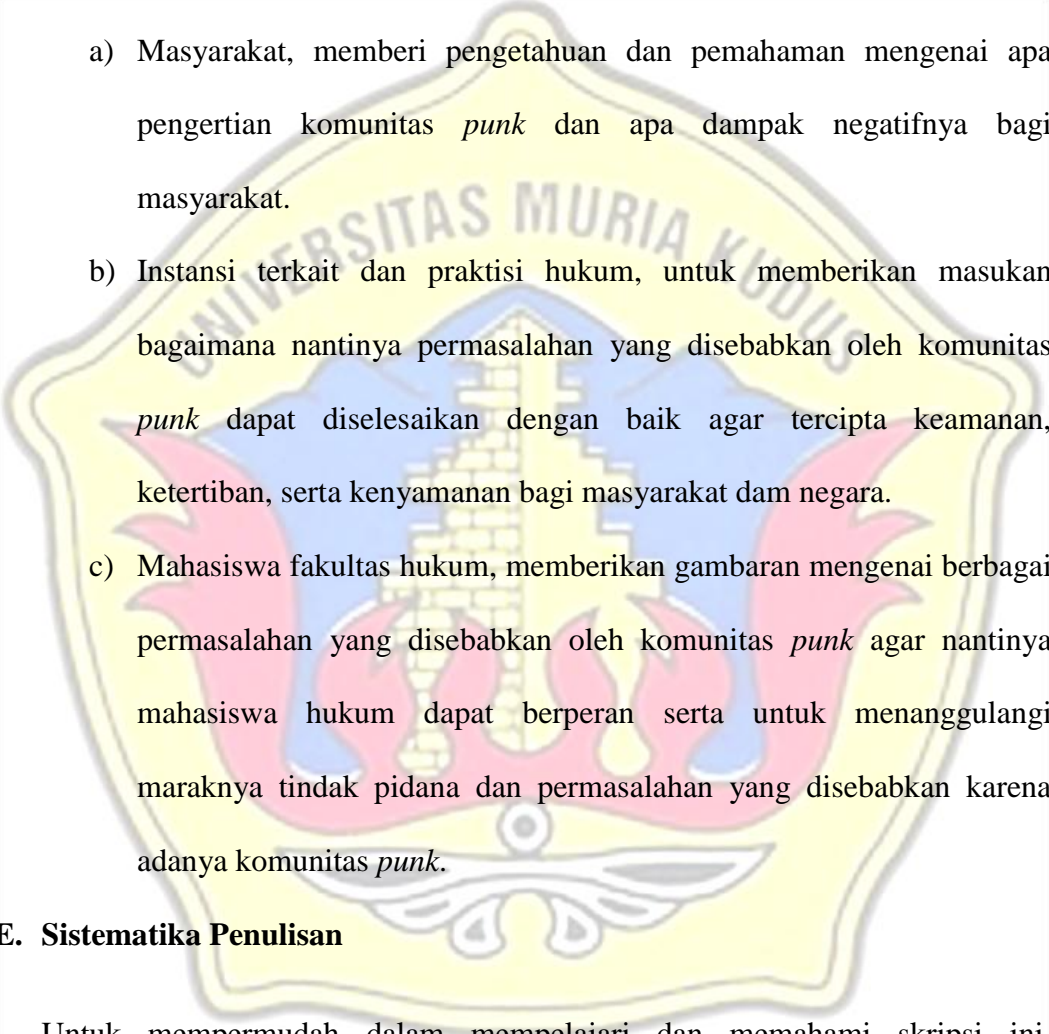
1. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan mengenai sejarah serta mengetahui penyebab terjadinya berbagai kejahatan yang dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten

Kudus, supaya nantinya dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- 
- a) Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai apa pengertian komunitas *punk* dan apa dampak negatifnya bagi masyarakat.
 - b) Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan bagaimana nantinya permasalahan yang disebabkan oleh komunitas *punk* dapat diselesaikan dengan baik agar tercipta keamanan, ketertiban, serta kenyamanan bagi masyarakat dan negara.
 - c) Mahasiswa fakultas hukum, memberikan gambaran mengenai berbagai permasalahan yang disebabkan oleh komunitas *punk* agar nantinya mahasiswa hukum dapat berperan serta untuk menanggulangi maraknya tindak pidana dan permasalahan yang disebabkan karena adanya komunitas *punk*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat hal-hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Bab ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari pengertian kriminologi, aliran pemikiran dalam kriminologi, pengertian kejahatan, teori sebab-sebab kejahatan, konsep penanggulangan kejahatan, serta tinjauan mengenai komunitas *punk*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini. Dari hasil penelitian akan diuraikan mengenai penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan komunitas *punk* di Kabupaten Kudus, serta upaya dalam

menanggulangi dan memberantas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh komunitas *punk* di Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

